

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur :

- A.P. Parlindungan. 1998. *Pendaftaratan Tanah Di Indonesia* (Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997) Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P. 37 Tahun 1998), CV. Mandar Maju, Bandung, 1993
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undangundang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Effendi Perangin. 1989. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta, C.V. Rajawali
- Hutagalung, Arie S, dan Markus Gunawan. 2008. *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H. Nawawi. 2005. *Penelitian Terapan*. Gajahmada University Press Yogyakarta
- Irawan Soerodjo. 2014. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. LaksBang Mediatama. Yogyakarta
18. Undang-Undang Pokok Agraria, 1960 *
- M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. VI
- Plorius SP Sangsun. 2007. *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia. Jakarta
- Pipin, Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia
- R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Urip Santoso. 2013. *Hukum Perumahan*. Surabaya: Penerbit Prenadamedia Group

B. Peraturan Hukum :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita blokir atau Pencatatan blokir

C. Jurnal Hukum :

Andi Mardani. 2008. *Pelaksanaan Pencatatan Dalam Buku Tanah Menurut Ketentuan Pasal 126 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak)*. Tesis Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang.

Brylliani Putri Nathania Caroles, Eugenius Paransi, Edwin N. Tinangon. 2022. *Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Sertifikat Tanah Ganda (Studi Kasus Putusan PTUN NOMOR 36/G/2019/PTUN.SRG)*. Ejournal. Unsrat

Femmy Silaswaty Faried, Suparwi. 2020. *Penyuluhan Hukum Persoalan Pertanahan Pada Warga RT 001 RW 029 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia

Kumpulan Materi Pelatihan Intensif Hukum Property. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia (PPHBI), Hotel A One Jakarta, 13-14 Juni 2016

Muhammad Akbar Middin, Salle Salle, Aan Aswari. 2021. *Menakar Faktor Penghambat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dibidang Pertanahan*. Jurnal Ilmu Hukum

Ni Made Rian Ayu Sumardani , I Nyoman Bagiastra. 2021. *Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik*. Jurnal Hukum Kenotariatan

Rahmat Ramadhani. 2021. *Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah*. Jurnal sosial dan ekonomi

D. Sumber Internet :

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pemblokiran-tanah-dengan-penyitaan-tanah-lt5a6e858b613b3>, diakses tanggal 6 Desember 2022

